

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan mutu pendidikan di SMK masih dinilai sebagian besar masyarakat belum relevan dengan tuntutan dunia kerja. Salah satu upaya pemerintah untuk dapat menghasilkan mutu yang baik dan unggul tersebut adalah melalui pendidikan. Hasil data Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2018 Peta tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2017 lulusan Sekolah Dasar (SD) atau tidak tamat SD sebanyak 45,66%, lulusan SMP 17,98%, lulusan SMA 16,86%, dan lulusan SMK 9,73%. Tenaga kerja lulusan Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3 hanya 2,58%, dan sisanya, tenaga kerja yang berasal dari lulusan S1/D4 adalah 7,19%. Sejalan dengan pendapat Jefriando (2019) menyatakan bahwa pada Maret 2019, tingkat pengangguran tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%, angka tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Maret 2018. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat Indonesia di berbagai sektor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa SMK masih belum memenuhi kriteria agar mampu diserap dunia kerja dan industri. Mutu pendidikan SMK perlu dibenahi agar terwujud pendidikan kejuruan yang bermutu tinggi dan mampu mencetak lulusan yang berkompeten sesuai dengan standar pendidikan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan atau pendirian suatu pendidikan.

Pengelolaan kurikulum SMK masih dirasakan kurang saat proses belajar mengajar berlangsung dikelas. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Gunawan Hidayat (2017) bahwa SMK akan berjalan dengan baik dan mempunyai lulusan yang dapat diterima di dunia kerja jika kurikulum yang

digunakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap siswa. Kurikulum termasuk dalam standar pendidikan nasional dan komponen penting sebagai proses berlangsungnya kegiatan belajar dalam kelas akan berlangsung.

Kualitas guru dalam menjamin mutu pendidikan belum dijadikan perhatian. Terbukti dengan data Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2018 dapat diketahui bahwa di Indonesia seluruh guru SMK berjumlah 359.099 orang. Dari jumlah tersebut masih terdapat sebesar 218.614 orang guru SMK atau sebesar 61% yang belum memiliki kualifikasi S1 dan ada sebesar 140.485 orang guru SMK atau sebesar 39% yang telah memiliki kualifikasi S1. Hal tersebut berpengaruh kepada kualitas yang diberikan kepada siswa sejalan dengan pernyataan Kholid (2014) Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. bahwa dalam pengajaran materi, kebanyakan guru tidak menggunakan media atau alat bantu. Minimal biasanya guru hanya menggunakan media papan tulis atau tampilan slide power point seadanya untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kualitas guru perlu diimbangi agar tercipta proses belajar mengajar di dalam kelas yang baik dan memadai.

Pengelolaan sarana dan prasarana di SMK belum dilaksanakan secara maksimal. Pernyataan seirama dikemukakan oleh Saefudin (2015) bahwa SMK negeri dan swasta yang ada selama ini belum secara optimal mendapatkan bantuan alat-alat praktik, kuantitas SMK yang semakin besar tidak diimbangi dengan kualitas sarana dan prasarana yang baik. Sarana dan prasana termasuk dalam standar nasional pendidikan dan komponen penting sebagai penunjang proses pembelajaran yang harus dipenuhi. Pembelajaran SMK perlu diimbangi

dengan sarana dan prasarana yang memadai agar tercipta proses belajar mengajar yang berkualitas.

Pengaruh budaya dan lingkungan belum dijadikan perhatian dalam penyelenggaraan SMK. Sekolah cenderung tidak memperdulikan budaya disiplin dalam keseharian di lingkungan SMK. Pernyataan seirama dikemukakan oleh Wahyudin (2013) ditengah keberlangsungan hidup bangsa yang berada ditengah-tengah perkembangan zaman dengan teknologi kian canggih menyebabkan berbagai perubahan dan pergeseran nilai seperti yang terjadi akhir-akhir ini yang kian cepat. Budaya dan lingkungan merupakan awal terbentuknya karakter bagi setiap peserta didik, implikasinya sekolah akan merancang apa yang mesti dilakukan dan berusaha memahami tindakan-tindakan yang dirancangnya sebagai sesuatu yang disepakati bersama. Dengan kata lain tindakan ini mendukung untuk terciptanya budaya sekolah yang baik. Pengaruh budaya dan lingkungan perlu dibenahi agar tercipta budaya yang baik dalam SMK.

Perubahan pendidikan mutu berbasis pusat menjadi manajemen mutu berbasis sekolah masih belum diperhatikan oleh setiap sekolah. Sekolah diberikan kewenangan lebih untuk mengatur setiap perubahan dan sistem sesuai dengan kondisi dan SDM yang ada pada sekolah tersebut hal tersebut sejalan dengan pendapat Kholis (2017) perubahan sistem yang ada pada sekolah memberikan otonomi luas kepada pemimpin sekolah guna mencapai visi misi setiap sekolah. Perubahan sistem manajemen terpusat menjadi manajemen mutu berbasis sekolah perlu diperhatikan agar SMK dapat mengelola sesuai kebutuhan.

Manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut seirama dengan pendapat Triansari (2017) Penerapan konsep MBS di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, terkait dengan

kesiapan sumber daya pendidikan. Berita tersebut didukung dengan Depdiknas (2009) Berdasarkan hasil kajian lapangan ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi MBS di sekolah, diantaranya yaitu: (1) belum dipahaminya konsep MBS secara utuh dan benar oleh para pemangku kepentingan (stakeholders); (2) resistensi terhadap perubahan karena kepentingan, ketidakmampuan secara teknis dan manajerial, atau tertambat pada tradisi dan kelaziman yang telah mengkristal dalam tubuh sekolah dan dinas pendidikan; (3) kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS. Manajemen berbasis sekolah dapat ditingkatkan dengan pengelolaan sekolah secara menyeluruh serta memaksimalkan potensi yang ada.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih rendah. Terbukti dengan kompetensi lulusan SMK yang belum mampu memenuhi kriteria sebagai tenaga kerja industri yang berkompeten pada bidangnya. Mutu pendidikan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK termasuk didalamnya sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran.

Pengelolaan kurikulum pada SMK yang belum sesuai dengan prinsip MBS membuat guru sebagai pengelola kelas dan siswa sebagai objek terasa monoton dengan kurikulum yang sentralistik dan cenderung tidak melakukan perubahan dengan situasi yang ada. Tenaga pendidik kebanyakan tidak menggunakan media atau alat bantu. Minimal biasanya guru hanya menggunakan media papan tulis atau tampilan slide power point seadanya untuk menyampaikan materi pembelajaran.

Guru pada SMK tidak diimbang dengan kualitas dan kemampuan yang sesuai dalam bidangnya maupun dalam kualitas pendidikan sebagai dasar kualifikasi setiap guru. Kualitas guru menjadi hal penentu dalam pendidikan kelas karena proses pembentukan pada setia siswa ada di kelas dan dilakukan oleh setiap guru. Penyeleksian smk perlu memperhatikan kualitas guru yang ada guna menunjang proses pembelajaran. Guru menjadi salah satu sarana bagi siswa untuk dapat menjadi penentu pada setai diri siswa.

Penyelenggaraan SMK tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas sarana dan prasarana dalam pendidikan menjadi penentu proses pembelajaran berjalan dengan lancar atau tidak. Penyelenggaraan SMK perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang proses pembelajaran. Media pembelajaran menjadi salah satu sarana belajar siswa yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyampaian materi.

Pengaruh budaya dan lingkungan SMK yang belum menjamin budaya disiplin dalam keseharian di lingkungan SMK. Budaya dan lingkungan pendidikan menjadi penentu proses pembentukan karakter yang akan dibawa hingga dunia kerja. pihak SMK perlu memperhatikan pengaruh budaya dan antisipasinya guna menunjang proses karakter pribadi yang berguna bagi siswa.

Perubahan sistem terpusat menjadi manajemen mutu berbasis sekolah masih belum diperhatikan di SMK. Pemangku sekolah bertanggungjawab untuk memberikan dan mengarahkan sistem sekolah sesuai dengan ketentuan visi misi setiap sekolah sesuai dengan kondisi dan SDM yang ada. Salah satu penentu keberhasilan pada manajemen mutu berbasis sekolah ada pada otonomi yang diberikan kepada pemangku sekolah.

Manajemen berbasis sekolah belum dimanfaatkan secara baik oleh sekolah. Konsep MBS pada setiap sekolah hanya sekedar melaksanakan belum dipahaminya konsep MBS secara utuh dan benar oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), resistensi terhadap perubahan karena kepentingan, ketidakmampuan secara teknis dan manajerial, atau tertambat pada tradisi dan kelaziman yang telah mengkristal dalam tubuh sekolah menyebabkan kurang maksimalnya penerapan manajemen yang ada pada sekolah. Pemberian hak dan wewenang serta keleluasaan mengatu dan mengurus kepentingan pada sekolah perlu pembenahan dan penerapan secara maksimal agar terwujudnya manajemen berbasis sekolah yang baik.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada implementasi manajemen berbasis sekolah dan perbandingan manajemen berbasis sekolah bagi para siswa dan guru yang ada di SMK Negeri dan Swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari prinsip-prinsip manajemen.

Implementasi manajemen berbasis sekolah dimaksudkan agar pihak siswa dan guru dapat menentukan dan memodifikasi kegiatan yang ada dalam sekolah sesuai dengan situasi, kondisi dan ketentuan agar sesuai dengan visi misi di setiap sekolah tanpa mengurangi kaidah inti dari setiap penerapannya. Implementasi manajemen berbasis sekolah perlu adanya dorongan dan partisipasi dari semua pihak agar terselenggara dengan baik dan dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal prestasi dan manajemen sekolah.

Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam penelitian ini dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan

dan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada SMK negeri dan swasta yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga sebagai bahan inovasi dan bahan evaluasi bagi setiap guru dan warga sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah pada setiap pembelajaran yang ada pada dalam kelas maupun luar kelas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi manajemen berbasis sekolah pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah?
2. Bagaimanakah perbandingan implementasi manajemen berbasis sekolah pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari dilihat dari prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini, antara lain untuk:

1. Mengetahui hasil implemntasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari dilihat dari prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.
2. Mengetahui hasil perbandingan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari dilihat dari prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada pihak siswa, guru dan pemimpin sekolah:

1. Siswa
  - a. Siswa berfikir kreatif dan meningkatkan prestasi belajar dengan penerapan manajemen berbasis sekolah.
  - b. Siswa dapat berfikir kritis atas penerapan manajemen berbasis sekolah yang ada pada sekolah.
2. Guru
  - a. Guru mendapatkan acuan kepada pihak guru lain untuk melakukan tindak lanjut yang lebih terhadap permasalahan sekolah yang berkaitan langsung dengan manajemen berbasis sekolah.
  - b. Guru mendapatkan wadah untuk kreatif dan kritis dengan mengembangkan manajemen berbasis sekolah.
3. Pemimpin Sekolah
  - a. Pemimpin sekolah mendapatkan kekuasaan penuh yang dapat meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai.
  - b. Pemimpin sekolah mendapatkan bahan pertimbangan dari berbagai pihak yang dapat diterapkan dalam menunjuang peningkatan manajemen berbasis sekolah.